# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dukungan organisasi memiliki peranan penting dalam peningkatan kinerja pegawai (Marbun, 2022). Dukungan organisasi akan memberikan pandangan kepada pegawai tentang sejauh apa organisasi memberikan apresiasi dan dukungan atas kinerja yang telah dicapainya (Hikmah dkk., 2020). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Lembaga, setiap kementerian/lembaga memiliki unit pengelola dukungan administrasi yang merupakan wujud dari dukungan organisasi. Sebagai bentuk peningkatan koordinasi dukungan administrasi tersebut, diberlakukan reformasi birokrasi yang memiliki peran utama dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi lembaga-lembaga pemerintahan (Rakhwanto, 2011).

Salah satu strategi dari reformasi birokrasi ini yaitu pemberian tunjangan kinerja bagi setiap PNS sebagai bentuk insentif dari organisasi atas kinerja yang telah dicapainya. Melalui tunjangan kinerja yang diberikan kepada setiap PNS, maka akan meningkatkan motivasi dan produktivitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakiki dkk. (2022); Estiningtyastuti (2022); Mardjuni & Karim (2023); Najoan dkk. (2018); Setyorini & Astuti (2022), bahwa

pemberian tunjangan kinerja memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja PNS, yang artinya dengan adanya tunjangan kinerja maka akan meningkatkan motivasi kerja para PNS.

Namun demikian, masih ditemui adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang justru memiliki peran penting dalam proses pembayaran tunjangan kinerja. Penyalahgunaan wewenang tersebut terjadi pada salah satu kementerian/lembaga dan menjadi sorotan oleh berbagai pihak. Setiawan (2023) menyatakan, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menetapkan 10 PNS menjadi tersangka dari kasus ini atas dugaan tindak pidana korupsi. Hal tersebut menunjukan adanya celah dalam pemrosesan tunjangan kinerja, sehingga terbukanya kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan pribadi. Di sisi lain, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022, masih terdapat beberapa jenis permasalahan terkait belanja pegawai, termasuk pada Kementerian PUPR. Permasalahan yang menjadi temuan di Kementerian PUPR yaitu belum optimalnya penggunaan sistem kehadiran oleh para pegawai. Lebih rinci permasalahan terkait belanja pegawai di seluruh kementerian/lembaga yang termuat dalam LHP LKPP sebagaimana pada Tabel I.1.

Isu-isu ini menjadi salah satu pertimbangan penting perlunya perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan sistem dalam pengelolaan belanja pegawai khususnya pada pembayaran tunjangan kinerja. Salah satu langkah tegas dan konkrit pemerintah untuk menindaklanjuti adanya serangkaian permasalahan

dalam pelaksanaan anggaran pemerintah tersebut yaitu dengan menetapkan peraturan perubahan terkait pembayaran tunjangan kinerja melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Negara/Lembaga. Ketentuan perubahan sebagaimana termuat dalam peraturan tesebut yaitu terkait pemusatan pembayaran tunjangan kinerja melalui satu DIPA dan waktu pembayaran yang dilaksanakan pada hari pertama di setiap bulannya. Dengan ditetapkannya peraturan ini maka akan meningkatkan efektivitias dan efisiensi penggunaan anggaran serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun di sisi lain, ketentuan ini juga menjadi tuntutan bagi setiap kementerian/lembaga untuk dapat merealisasikan ketentuan tersebut secara cepat dan tepat.

Tabel I. 1 Permasalahan Belanja Pegawai Tahun 2022

| No | Masalah | Jumlah K/L | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembayaran gaji dan tunjangan dengan nilai yang tidak seharusnya | 13 | 5.403.248.133 |
| 2 | Kesalahan perhitungan | 2 | 28.112.639 |
| 3 | Pembayaran yang tidak didukung bukti yang valid | 7 | 219.761.576 |
| 4 | Kelebihan pembayaran | 14 | 25.630.444.202 |
| 5 | Kesalahan perhitungan pajak penghasilan | 8 | 44.215.236.645 |
| 6 | Kesalahan penganggaran | 2 | 13.800.000 |
| 7 | Kesalahan lainnya | 10 | 0 |
| Jumlah | | | 75.510.603.197 |

Sumber: LHP BPK (2022)

Dalam mewujudkan tuntutan ini, tidak akan lepas dari peran dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang memberikan prospek akan kemudahan dan kepraktisan

untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai aktivitas kehidupan manusia termasuk pada sektor publik (Reza & Hermawansyah, 2019). Disrupsi teknologi yang menghasilkan inovasi teknologi informasi mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan peran sistem informasi yaitu salah satunya melalui penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2018 (SPBE). SPBE merujuk pada pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dalam urusan penyelenggarakan pemerintahan. SPBE mendorong baik instansi pusat maupun daerah untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi tata kelolanya melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi. Namun, indeks SPBE nasional pada tahun 2022 hanya sebesar 2,34 dari skala 5 (kategori cukup), yang artinya masih diperlukan peningkatan dan dorongan kepada instansi pemerintah agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sarana sistem informasi. Dengan demikian, perancangan atas pengembangan sistem informasi di sektor publik menjadi hal yang sudah selayaknya dilaksanakan.

Tuntutan peningkatan pengelolaan pemerintahan melalui optimalisasi teknologi informasi berdampak pada kebutuhan perancangan pengembangan sistem informasi semakin nyata. Pengembangan sistem informasi khususnya pada pembayaran tunjangan kinerja di kementerian/lembaga vital perlu segera dilakukan. Kementerian PUPR sebagai instansi yang memiliki peran vital dalam pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru wilayah Indonesia, sudah selayaknya melakukan optimalisasi terhadap dukungan manajemen di

organisasinya. Sebagaimana tercantum dalam Laporan Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2022, Kementerian PUPR memiliki 39.396 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia. Pentingnya dukungan organisasi bagi seluruh pegawai ini akan berdampak pada kinerja dalam pembangunan infrastruktur. Dalam mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pembayaran tunjangan kinerjanya, Kementerian PUPR didukung oleh beberapa sistem informasi yaitu seperti BRAVO dan aplikasi perhitungan tukin berbasis desktop. Aplikasi BRAVO memiliki kapasitas sebagai portal dalam pemenuhan layanan data dan informasi pegawai yang salah satunya yaitu sebagai perekaman kehadiran pegawai. Namun karena kapasitas yang dimiliki BRAVO terbatas, maka pengembangannya tidak dapat menuntaskan proses pembayaran tunjangan kinerja. Di sisi lain, aplikasi perhitungan tukin berbasis desktop digunakan oleh beberapa unit pembayar tunjangan kinerja, sedangkan sisanya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Perbedaan ini dikarenakan pengadaan aplikasi perhitungan tunjangan kinerja dilakukan secara mandiri oleh masing-masing unit pembayar. Dalam pengadaan tersebut tidak mencakup *source code* dari aplikasi ini sehingga pengembangannya tidak dapat diintegrasikan dengan BRAVO.

Atas dasar tersebut maka diperlukan perancangan sistem informasi yang dapat menuntaskan proses pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian PUPR. Perancangan pengembangan sistem identik dengan metode *System Development Life Cycle (SDLC). SDLC* menyediakan rangkaian proses untuk menciptakan dan memodifikasi sistem yang meliputi model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi (Rachman & Noviyanto,

2017). *SDLC* terbagi dalam beberapa tahap yaitu perencanaan *(planning)*, analisis *(analysis)*, desain *(design)*, implementasi *(implementation),* dan pemeliharaan *(maintenance).* Dalam melaksanakan setiap tahapan *SDLC,* salah satu pendekatan yang sering digunakan yaitu pendekatan *waterfall.* Pendekatan *waterfall* ini memberikan kerangka kerja yang terstruktur secara terurut atau sekuensial (Kurniawati & Badrul, 2021).

Terdapat beberapa studi yang ditemukan terkait pengembangan sistem informasi pada proses pembayaran tunjangan kinerja. Nugroho (2020) mengulas pengembangan sistem informasi pembayaran tunjangan kinerja khususnya pada proses perhitungan tunjangan kinerja, sedangkan Pasrun dkk. (2022) mengulas tentang *web service* yang menghubungkan antara aplikasi kehadiran dengan aplikasi tukin. Keduanya melakukan penelitian dengan menggunakan metode *waterfall.* Sedangkan Syarifudin & Ani (2019) mengembangkan rancangan sistem informasi terkait pengajuan dan pelaporan tunjangan kinerja menggunakan metode *prototype.* Adapun Sari (2022) dan Wahyudi dkk. (2021) melakukan pengembangan sistem informasi untuk menyediakan data kehadiran pegawai yang akan mendukung dalam proses pembayaran tunjangan kinerja. Belum terdapat penelitian yang membahas tentang pengembangan sistem informasi pada proses pembayaran tunjangan kinerja terintegrasi dengan sistem penggajian dan sistem kepegawaian khususnya pada Kementerian PUPR, sehingga penelitian ini akan memberikan usulan rancangan pengembangan sistem informasi yang mendukung proses pembayaran tunjangan kinerja yang terintegrasi di Kementerian PUPR. Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi gap penelitian pada bidang tersebut.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam rancangan ini melalui *benchmarking* pada instansi pemerintah lainnya dan dirancang dengan memanfaatkan interkoneksi dengan sistem yang sudah. Adapun rancangan atas sistem informasi pembayaran tunjangan kinerja tersebut akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul **"Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Tunjangan Kinerja Di Kementerian PUPR Sesuai PMK 20 Tahun 2023"**. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas, dan akuntabilitas dalam proses pembayaran tunjangan kinerja. Penelitian ini juga diarahkan untuk menciptakan solusi teknologi terkini yang memungkinkan pengelolaan tunjangan kinerja secara otomatis, tepat waktu, dan akurat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka dapat dirumuskan masalah terkait topik penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kebutuhan pengembangan sistem informasi terkait pembayaran tunjangan kinerja di Kementerian PUPR?
2. Bagaimana rancangan pengembangan sistem informasi terkait pembayaran tunjangan kinerja di Kementerian PUPR?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kebutuhan pengembangan sistem informasi terkait pembayaran tunjangan kinerja di Kementerian PUPR.

2. Memberikan usulan rancangan sistem informasi terkait pembayaran tunjangan kinerja di Kementerian PUPR.

## 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini akan memberikan batasan lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem informasi ini akan digunakan secara internal di lingkungan Kementerian PUPR untuk proses pembayaran tunjangan kinerja. Pengembangan juga akan meliputi integrasi dengan sistem informasi eksisting lainnya yang mendukung.
2. Penelitian ini akan memberikan rancangan sistem untuk pemrosesan tunjangan kinerja induk dan tidak mengakomodasi untuk pembayaran tunjangan kinerja susulan dan kekurangan.
3. Penelitian ini meliputi tahapan-tahapan dari *SDLC* berupa perencanaan, analisis, dan desain sistem. Penelitian ini tidak sampai pada tahapan selanjutnya yaitu implementasi dan pemeliharaan.
4. Output dari pengembangan sistem ini tidak menghasilkan aplikasi yang siap digunakan, melainkan terbatas pada visualisasi rancangan sistem informasi yang mendukung proses pembayaran tunjangan kinerja. Output dari penelitian ini meliputi *Business Process Diagram (BPD), Use Case, ERD, Database* dan *Mock-Up* sistem informasi yang dikembangkan.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif baik secara praktis maupun akademis. Adapun manfaat yang akan diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dengan menambah susbtansi pengetahuan di bidang pengembangan sistem informasi. Melalui penelitian ini juga akan menambah referensi dan acuan bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang pengembangan sistem informasi.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi Kementerian PUPR dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan tunjangan kinerja serta membawa organisasi untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik. Secara rinci, manfaat akan didapatkan untuk para pengguna sistem informasi ini yaitu berupa kemudahan bagi setiap pegawai Kementerian PUPR dalam memantau hak materilnya. Kemudahan juga hadir bagi petugas pengelola belanja peagawai dalam menjalankan tugasnya melakukan pemrosesan pembayaran tunjangan kinerja.

## 1.6 Metodologi Penelitian

### 1.6.1 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu sistem informasi pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian PUPR. Adapun pihak yang mendukung jalannya sistem informasi tersebut adalah para pengguna yang tersebar di seluruh

unit kerja Kementerian PUPR. Pengguna tersebut terbagi menjadi 2 kelompok yaitu para admin sistem dan pegawai Kementerian PUPR. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Pegawai di Kementerian PUPR, Unit Eselon II Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR sebagai pembina yang terlibat dalam proses pembayaran tunjangan kinerja dan Unit Eselon I yang akan dipilih melalui metode sampling. Sedangkan pihak eksternal yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Kementerian/Lembaga lainnya yang akan ditunjuk sebagai *benchmark* penelitian ini.

### 1.6.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem informasi pada penelitian ini menggunakan *System Development Life Cycle (SDLC)* dengan model *Waterfall* serta verifikasi dan validasi atas kesesuaian sistem yang dirancang dengan kebutuhan pengguna. Tahapan *SDLC* yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada Romney dkk. (2020) dan Valacich & George (2020) yang meliputi:

1) Tahap perencanaan

   Pada tahap ini, penelitian akan dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan sehingga diperoleh pemahaman mendasar atas sistem yang akan dikembangkan. Pemahaman yang diperoleh pada tahap ini meliputi ruang lingkup pengembangan sistem, masalah yang dihadapi, peluang dari adanya pengembangan sistem, hasil yang ingin dicapai, serta nilai ekonomis dari pengembangan sistem. Pemahaman masalah yang dihadapi akan dilaksanakan menggunakan *PIECES Framework,* sedangkan pada tahap penilaian ekonomis akan dilaksanakan identifikasi terkait item-

item yang akan muncul dari segi biaya dan manfaat. Namun karena keterbatasan waktu penelitian maka penilaian ekonomis tidak mencakup perhitungan besarnya nilai biaya dan manfaat yang akan timbul.

2) Tahap analisis

Analisis pada penelitian ini meliputi identifikasi terhadap sistem yang akan dikembangkan meliputi *user requirements* dan *user structuring. User requirements* akan diidentifikasi dan menghasilkan kebutuhan fungsional serta kebutuhan non fungsional, sedangkan *user structuring* akan mengembangkan hasil analisis *user requirements* ke dalam *Unified Modeling Language (UML)* dan *Business Process Modeling Notation (BPMN).*

3) Tahap desain

Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan spesifikasi desain sistem informasi melalui *logical design* dan *physical design.* Kegiatan pada tahap *logical design* yaitu penyusunan *Entitiy-Relational Diagram (ERD)* dan kegiatan pada tahap *physical design* yaitu penyusunan *Database* serta *Mock-Up* sistem yang dikembangkan.

Selanjutnya setelah melakukan serangkaian proses pada *SDLC,* maka akan dilakukan validasi dan verifikasi. Validasi dan verifikasi ini dilaksankan untuk memperoleh konfirmasi dari para narasumber bahwa sistem telah disusun sesuai dengan kebutuhan para pengguna.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik, diantaranya:

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data tanpa harus menanyakan pertanyaan secara langsung kepada responden karena observasi dilakukan melalui kegiatan pengamatan, perekaman, analisis dan menginterpretasikan kegiatan objek penelitian (Bougie & Sekaran, 2020). Observasi memberikan data yang kaya akan informasi dan minim terkontaminasi oleh pandangan peneliti yang bias karena data didapatkan dari fenomena yang tengah terjadi. Namun metode ini memerlukan waktu yang cukup lama dan memiliki tantangan tersendiri, sehingga observasi dilakukan secara sampling. Adapun sampling dilakukan pada unit pembayaran tunjangan kinerja pada unit kerja di Kementerian PUPR.

2) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan teknik yang efektif dalam pengumpulan informasi melalui percakapan antara peneliti dengan narasumber yang berjumlah satu orang atau lebih (Saunders dkk., 2019). Wawancara akan dilaksanakan dengan pola *semi-structured,* di mana pertanyaan disusun berdasarkan topik utama lalu dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan kunci. Pada wawancara dengan pola ini akan memungkinkan adanya pengembangan pertanyaan selama prosesi wawancara. Adapun pihak yang terlibat dalam wawancara ini yaitu Unit Eselon II di Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR sebagai unit pembina yang terlibat dalam proses pembayaran tunjangan kinerja dan unit pembayar tunjangan kinerja pada Unit Eselon I yang berbeda-beda di Kementerian

PUPR yang mana akan dipilih melalui sampling. Wawancara juga akan dilaksanakan kepada pegawai yang akan dipilih melalui metode sampling. Menurut Bougie & Sekaran (2020), penentuan sampel pada penelitian kualitatif dilakukan melalui *purposive sampling,* yang mana narasumber dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Pada penelitian ini, kriteria yang digunakan yaitu jumlah PNS yang dikelola dalam suatu Unit Eselon I serta mempertimbangkan keragaman hasil wawancara yang akan diperoleh. Wawancara juga akan dilaksanakan pada instansi eksternal sebagai *benchmarking* sistem pembayaran tunjangan kinerja.

3) Studi literatur

Studi literatur menjadi alternatif lain dalam pengumpulan data penelitian. Hart (1998, dikutip dalam Bougie & Sekaran, 2020) menyatakan bahwa studi literatur merupakan proses pengumpulan data melalui analisa dokumen yang mengandung informasi, ide, dan bukti sehingga dapat memberikan pandangan serta penjelasan tentang topik penelitian. Melalui studi literatur, peneliti mampu menambah wawasan dari sudut pandang para ahli. Studi literatur yang akan dilakukan pada penelitian ini berupa analisis literatur yang tersedia terkait pembayaran tunjangan kinerja di Kementerian PUPR dan organisasi lainnya. Literatur tersebut dapat berupa peraturan, dokumentasi pengembangan sistem informasi yang tersedia, dan sumber lainnya.

## 1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu pendahuluan, landasan teori, analisis sistem berjalan, rancangan sistem yang diusulkan, dan penutup sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian dan metodologi penelitian yang menggambarkan kerangka penelitian secara garis besar.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori yang sifatnya baik umum maupun khusus berkaitan dengan pengembangan sistem informasi. Bab landasan teori ini juga mengulas tentang metodologi pengembangan sistem informasi serta substansi-substansi pendukungnya.

BAB III ANALISIS SISTEM BERJALAN

Bab ini menyajikan latar belakang objek penelitian yang terdiri dari sejarah organisasi dan struktur organisasi. Bab ini juga menjelaskan uraian kegiatan yang akan diteliti dan sistem yang berjalan, identifikasi permasalahan yang dihadapi, serta alternatif pemecahan masalah tersebut.

BAB IV RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

Bab ini menyajikan serangkaian rancangan *SDLC* yang meliputi tiga fase yaitu perencanaan, analisis, dan desain. Usulan rancangan tersebut dilengkapi dengan rancangan *Unified Modelling Language (UML), Business Process Modeling Notation (BPMN), ERD, Database,* dan *Mock-Up.* Rancangan juga akan dilengkapi dengan hasil verifikasi dan validasi atas kesesuaian sistem informasi terhadap kebutuhan pengguna.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini juga memuat keterbatasan dari penelitian.